



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : JONI HARYADI
NIK : 3174090306730014
Lembaga : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Kerja : BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Kerja : BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 24 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JONI HARYADI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 510902

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.075.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 353 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.500.000

1. MOTOR, HONDA RODA DUA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIK Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 89.291.107

F. HARTA LAINNYA Rp. 195.000.000

Sub Total Rp. 1.367.541.107

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.367.541.107

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.